

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah adanya reformasi pada tahun 1998 terjadi berbagai perubahan di Indonesia salah satunya dalam sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang awalnya bersifat sentralisasi (terpusat) sekarang mengalami perubahan menjadi desentralisasi. Perubahan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menuntut adanya perubahan kebijakan dalam setiap pemerintah daerah, hal ini memicu terbentuknya otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah memperoleh dana perimbangan, tetapi harus diimbangi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif serta bertanggung jawab.

Upaya nyata untuk mencapai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban laporan keuangan dari pemerintah yang dapat memenuhi prinsip-prinsip yang tepat waktu, serta disusun dengan cara mengikuti standar dari akuntansi pemerintahan. Tahun 2005 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam perkembangannya, PP no 24 tahun 2005 diperbaharui menjadi PP no 71 tahun 2010.

Standar dibutuhkan untuk penyusunan dari laporan serta penyajian laporan keuangan pemerintah.

Pentingnya dalam pengungkapan laporan keuangan yang tersedia membuat pemerintah hendaknya dapat mengungkapkan informasi laporan keuangan dalam bentuk akuntabilitas serta transparansi dari keuangan publik. Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah, disajikan dengan berusaha memenuhi prinsip ketepatan waktu serta mengikuti Standar dari Akuntansi Pemerintahan yang merupakan upaya kongkrit untuk melaksanakan transparansi serta akuntabilitas.

Pengungkapan laporan keuangan daerah harus didukung oleh sistem yang memadai. Setiap pemerintah daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi pengungkapan laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ukuran pemerintah (*Size*), kompleksitas Pemerintah Daerah, dan belanja modal terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadinya perubahan. Perubahan tersebut khususnya dalam hal ekonomi secara otomatis akan meningkatkan aktivitas bisnis yang terjadi dalam daerah tersebut. Aktifitas ini dapat diukur dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Besarnya angka PDRB suatu daerah akan mempengaruhi pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah. Meningkatnya aktivitas ekonomi juga bisa

mengakibatkan meningkatnya pengungkapan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nirmala (2012), Martani dan Zaelani (2011) dan Prabowo Dkk (2008) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam satu sisi pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola daerahnya termasuk pengelolaan terhadap pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, namun disisi lain, luasnya kewenangan yang dimiliki beserta besarnya dana yang dikelola disisi lain dapat mengakibatkan pengungkapan laporan keuangan yang semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2009) menemukan bahwa pendapatan asli daerah menunjukkan hubungan yang negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan, dan Hartono (2014) dan Puspitasari (2013) tidak menemukan pengaruh PAD terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Ukuran (*Size*) suatu entitas juga mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan. Ukuran pemerintah diukur dari asset yang dimiliki daerah. Pemerintah harus mampu mengelola asset yang dimilikinya secara baik, karena pada hakekatnya asset yang dimiliki oleh pemerintah adalah milik rakyat yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyaknya asset yang ada dalam sebuah organisasi akan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan, karna banyaknya asset dalam suatu organisasi maka berpotensi terhadap tingginya pengungkapan laporan

keuangan. Tingginya resiko kecurangan bisa menjadi salah satu penyebab tingginya pengungkapan laporan keuangan. Hasil temuan dari Prabowo Dkk (2008), Nirmala (2012), Martani dan Zaelani (2011) dan Rudi Hartono Dkk (2014) juga menemukan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan. Kristanto (2009) menemukan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Kompleksitas juga menjadi penentu terjadinya pengungkapan laporan keuangan. Kompleksitas pemerintah daerah dapat dilihat jumlah satuan kerja perangkat daerah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Titus Puspiasari menyimpulkan bahwa semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit dalam pengungkapan laporan keuangan. Puspitasari (2013) dan Hartono Dkk (2014) menemukan pengaruh positif kompleksitas daerah (jumlah SKPD) terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Martani dan Zaelani (2011) tidak menemukan adanya pengaruh jumlah kecamatan terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Menurut Abdullah (2008) dalam Kristanto (2009) Belanja Modal berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena semakin besar anggaran belanja modal yang tidak dimbangi dengan pengungkapan laporan keuangan akan membuat publik merasa kecewa. Belanja Modal berpengaruh pengungkapan laporan keuangan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2009). Belanja Modal berpengaruh negatif pengungkapan laporan keuangan. Ini

menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menjalankan pengungkapan laporan keuangan dengan baik terhadap banyak kasus korupsi dan kolusi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas dan karena hasil penelitian yang berbedabeda pula, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di pemerintah daerah tersebut. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kompleksitas daerah, dan belanja modal sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah se Jawa Tengah Tahun 2012-2015.

Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian dari beberapa peneliti tersebut masih memberikan perbedaan pada beberapa variable. Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik kembali untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Pengungkapan laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan pengungkapan laporan keuangan yang efektif agar dapat memperoleh

keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah PAD memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Ukuran Daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah kompleksitas Pemerintah Daerah (jumlah SKPD) memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
2. Menganalisis pengaruh PAD memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah
3. Menganalisis pengaruh ukuran daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah

4. Menganalisis kompleksitas pemerintah daerah (jumlah SKPD) memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah
5. Menganalisis belanja modal memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperluas pengetahuan mengenai mata kuliah internal audit dalam program studi akuntansi di perguruan tinggi, serta untuk memperluas kajian mengenai pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kompleksitas pemerintah daerah (jumlah SKPD) terhadap pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah;

2. Pemerintah Daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan pengendalian intern pada pemerintah daerah, dan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya pengungkapan laporan keuangan, serta sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan untuk lebih meningkatkan pengungkapan laporan keuangan.

3. Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang khususnya jurusan akuntansi.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah studi literatur mengenai pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kompleksitas pemerintah daerah (jumlah SKPD) terhadap pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah.

4. Penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kompleksitas pemerintah daerah (jumlah SKPD) terhadap pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah.

5. Penelitian Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti, wawasan, referensi tambahan, dan sebagai literatur untuk penelitian lebih lanjut mengenai tema ini.